



CRITICAL ECOSYSTEM
PARTNERSHIP FUND



LAPORAN AKHIR
PROGRAM KEMITRAAN WALLACEA

**PENGELOLAAN SUMBERDAYA PERIKANAN SKALA KECIL
BERBASIS MASYARAKAT ADAT DI KBA WABULA,
KABUPATEN BUTON**



DISUSUN DAN DISAMPAIKAN OLEH
DESTRUCTIVE FISHING WATCH INDONESIA
2021 - 2022

LAPORAN AKHIR ROGRAM

I. INFORMASI PROGRAM

Wilayah Pendanaan : Koridor Laut Sulawesi Tenggara
KBA : Wabula
Strategic Direction(s) : 3. Tata kelola sumber daya alam berkelanjutan (perikanan skala kecil)
Nama Proyek : Pengelolaan Perikanan Skala Kecil Berbasis Masyarakat Adat di KBA Wabula, (Desa Holimombo Jaya dan Desa Wabula), Kabupaten Buton
Nomor Laporan : 01
Periode waktu : April 2021 – Juli 2022 (16 bulan)
Disampaikan oleh : Nasruddin (Koordinator program)
Tanggal : 29 Agustus 2022

Hibah CEPF:

(a) dalam USD : 47,015
(b) dalam mata uang lokal (Rp) : 658,210,000

Kontribusi Mitra : berupa *In kind* meliputi alokasi staff, kantor dan perlengkapan pendukung kerja

Kontribusi donor (program) lain (jika ada) : -

Periode program : April 2021 – Juli 2022

Lembaga pelaksana (mitra) : Destructive Fishing Watch Indonesia

II. RINGKASAN

Destructive Fishing Watch Indonesia bekerja pada KBA Wabula Koridor Laut Sulawesi Tenggara, tepatnya di Desa Wabula, Desa Wasampela, Desa Wabula 1, Desa Wasuemba Kecamatan Wabula dan Desa Holimombo Jaya Kecamatan Pasarwajo Kabupaten Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara. Masyarakat di keempat desa di Kecamatan Wabula mengelola sumberdaya laut dan perikanan berbasis masyarakat adat yang dikelola dengan sistem “Ombo”, sedangkan di Desa Holimombo Jaya kecamatan Pasarwajo, pemanfaatan sumberdaya laut di dominasi perikanan skala kecil, khususnya perikanan tuna. Selanjutnya penetapan wilayah KaOmbo oleh Masyarakat Hukum Adat (MHA) Wabula berpotensi menimbulkan konflik dengan nelayan luar diluar kawasan masyarakat adat dalam kaitannya dengan alat tangkap dan wilayah penangkapan. Kegiatan pemanfaatan sumberdaya laut di wabula juga belum didukung dengan sistem pendokumentasian, data dan informasi pemanfaatan sumberdaya laut. Untuk mengatasi persoalan ini, tim kami bekerja untuk (tujuan program) melalui kegiatan a) Menyediakan profil pengelolaan sumberdaya laut dan perikanan skala kecil di lokasi program, b) Meningkatkan kapasitas masyarakat melalui lembaga adat lokal dan c) Menyediakan dokumen rencana aksi pengelolaan sumberdaya laut dan perikanan skala kecil berbasis masyarakat adat.

Selama periode 16 Bulan program (April 2021 hingga Juli 2022), kami telah melakukan kegiatan a) Menyediakan profil pengelolaan sumberdaya laut dan perikanan skala kecil di lokasi program, b) Meningkatkan kapasitas masyarakat melalui lembaga adat lokal dan c) Menyediakan dokumen rencana aksi pengelolaan sumberdaya laut dan perikanan skala kecil berbasis masyarakat adat yang melibatkan total 398 orang (88 perempuan, 310 laki-laki) yang mencakup MHA Wabula, masyarakat lima desa, pemerintah lima desa, Pemerintah Daerah Kabupaten Buton, BPSPL Makassar wilker Kendari, BKIPM (SKIPM Baubau), Dinas Kelautan & Perikanan Provinsi, Universitas Dayanu Ikhsanuddin Buton. Beberapa hasil yang telah dicapai adalah tersedianya profil pengelolaan sumberdaya perikanan skala kecil di lokasi program, Terbitnya 86 **Pas Kecil** armada penangkap ikan < 5 GT bagi nelayan skala kecil di lokasi program, Meningkatnya pemahaman dan kapasitas MHA Wabula, tersedianya rambu pembatas zona KaOmbo (Daerah Perlindungan Laut) di wilayah MHA Wabula, serta Tersedianya dokumen rencana aksi pengelolaan Sumberdaya laut berbasis masyarakat adat. Hasil-hasil ini tercapai karena adanya peran aktif dan dukungan stakeholder terkait, keterbukaan masyarakat, dan ketertiban tim dalam mengelola waktu dan anggaran. Namun, *output* untuk memfasilitasi terbitnya **TDKP (Tanda Daftar Kapal Perikanan)** belum **tercapai**. Tim telah melakukan fasilitasi nelayan dan koordinasi dengan Pemerintah desa untuk proses TDKP akan dikelola secara mandiri oleh pemerintah desa untuk melanjutkan proses pasca diterbitkannya Pas Kecil. Selain hasil yang menjadi sasaran program, tim mendapatkan hasil tak terduga. Masyarakat dari desa tetangga tertarik dengan program yang dijalankan dan ikut menghadiri kegiatan pelatihan dan diskusi, meski tidak didanai oleh program. Mereka hadir sukarela dan aktif mempraktikkan hasil pelatihan.

Di sisi lain, tim mengalami beberapa tantangan dalam pelaksanaan program. Lokasi program bertambah menjadi lima desa dari dua desa yang direncanakan sebelumnya. Tentunya ketiga desa tambahan tersebut merupakan desa-desa yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari MHA Wabula. Atas kondisi tersebut tentunya tim bekerja lebih ekstra berkoordinasi di kelima desa program dimaksud. Selama periode program aktifitas tim sedikit terganggu oleh adanya Pandemi covid-19. Pada beberapa kesempatan terjadi pengetatan sehingga berdampak pada pelaksanaan kegiatan di luar waktu perencanaan awal. Tim juga mendapat tantangan oleh adanya konflik internal MHA Wabula sehingga tim sama sekali tidak dapat melakukan

aktifitas selama proses mediasi dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Kondisi tersebut memberi dampak signifikan terhadap pelaksanaan beberapa kegiatan seperti yang telah direncanakan sebelumnya. Dengan demikian, memaksa tim untuk berkoordinasi lebih lanjut guna mencari jalan keluar secara bersama dengan pihak-pihak terkait tanpa mengganggu proses atas penyelesaian atas konflik yang terjadi antara MHA Wabula di lokasi program. Oleh karenanya, secara keseluruhan aktifitas dan kegiatan yang tertunda dapat terselesaikan berkat dukungan dan kerjasama berbagai pihak yang cukup responsif terhadap keberlanjutan pengelolaan sumberdaya laut berbasis masyarakat adat di wilayah KBA Wabula, Kabupaten Buton. Tantangan lain adalah kondisi cuaca ekstrim menyebabkan angin dan adanya gelombang tinggi sehingga tim terpaksa menunda pelaksanaan kegiatan survey lapang dan pemasangan rambu pembatas pada zona KaOmbo (Daerah Perlindungan Laut). Tim kemudian melakukan koordinasi yang intens dengan penjaga laut untuk memberikan informasi yang aktual dilapangan sehingga kegiatan yang tertunda pada periode dimaksud dapat teratasi dalam periode berikutnya, sehingga semua kegiatan dapat terselesaikan sesuai dengan *output* yang ditargetkan.

Program telah memberikan dampak terhadap perlindungan pelestarian spesies dengan adanya penurunan ancaman. **Terperangkapnya penyu pada alat tangkap sero di perairan pantai Wabula telah menurun, dari 6 kejadian untuk penyu sisik dan 12 kejadian untuk penyu hijau menjadi 0 kejadian untuk penyu sisik dan 2 kejadian untuk penyu hijau.** Hal ini terjadi karena adanya penguatan terhadap lembaga adat dalam hal **penataan alat tangkap sero.** Selain itu spesies lainnya seperti teripang dan lola juga mengalami penurunan produksi tangkapan **di saat sistem buka tutup diberlakukan sehingga secara ekologis memberikan ruang dan waktu yang cukup terhadap biota tersebut berkembang** dalam jumlah yang lebih banyak. Dampak lainnya adalah tata kelola habitat yang lebih baik dalam bentuk adanya rencana aksi pengelolaan sumberdaya laut yang diintegrasikan ke dalam rencana pembangunan di desa. Pemerintah desa juga telah memasukkan program pengawasan laut dalam perencanaan desanya (Desa Wabula dan Desa Wasuemba). Hasil survey lapangan juga melaporkan bahwa kesehatan terumbu karang berkisar diantara 40 % - 70 % (Baik). Oleh karenanya peran lembaga adat, pemerintah desa, pengawas (Jaga Laut), serta masyarakat umum dan stakeholder yang telah terlibat selama program ini telah berkontribusi positif dengan berkurangnya ancaman terhadap spesies/biota dimaksud seperti penyu, lola dan teripang. Di tingkat masyarakat dan lembaga adat setempat tetap mempertahankan sistem pengelolaan yang dilakukan dengan sistem KaOmbo dan Ombo dengan tetap mengedepankan aspek bio-ekologi biota-biota yang di Ombo, meningkatkannya pemahaman masyarakat dan lembaga adat, dukungan operasional penjaga laut melalui desa, adanya rambu pembatas pada zona KaOmbo yang jelas dirasakan manfaatnya secara langsung oleh masyarakat. Tentunya dengan berpedoman terhadap **rencana aksi pengelolaan sumberdaya laut** dapat menjadi arah yang jelas bagi lembaga adat dan pemerintah desa menciptakan tata kelola habitat yang lebih baik di wilayah Masyarakat Hukum Adat (MHA) Wabula.

III. CAPAIAN

- A. Objective : Memperkuat tata kelola sumberdaya perikanan skala kecil di wilayah KBA Wabula (Desa Wabula, Wabula 1, Wasampela, Wasuemba dan Holimombo Jaya) dengan perbaikan data perikanan serta pelibatan peran aktif masyarakat berdasarkan prinsip Kearifan lokal.

Objective telah dicapai oleh program dengan terpenuhinya indikator sebagai berikut :

1. Tersedianya profil pengelolaan sumberdaya laut di lokasi program
2. Sistem manajemen lembaga adat terdokumentasi di lokasi program
3. Tersedianya kebijakan pengelolaan sumberdaya laut berdasarkan kearifan lokal dalam mendorong tata kelola sumberdaya laut yang baik di lokasi proyek

Indikator 1 dipenuhi melalui capaian dengan Tersedianya data dan profil pengelolaan sumberdaya laut di lokasi program (alat verifikasi [Dokumen Profil Pengelolaan Sumberdaya Laut di Lokasi Program](#))

Indikator 2 dipenuhi melalui capaian dengan meningkatnya kapasitas peran dan fungsi lembaga adat dan masyarakat lokal di lokasi program (alat verifikasi [Laporan Aktifitas Kegiatan Pelatihan](#))

Indikator 3 dipenuhi melalui capaian dengan Tersedianya rencana kebijakan/dokumen rencana aksi pengelolaan sumberdaya laut di lokasi program (alat verifikasi [Dokumen Rencana Aksi Pengelolaan Sumberdaya Laut](#))

- B. Output

Output 1 telah dicapai oleh program ini, yakni “Tersedianya profil sumberdaya perikanan skala kecil di lokasi program”.

Indikator output 1 yang pertama adalah “tersedianya data kondisi masyarakat di wilayah KBA Wabula serta adanya peta Daerah Perlindungan Laut (DPL)/wilayah KaOmbo di Desa Wabula dan Wasampela dan KaOmbo di Desa Wasuemba”. Indikator output ini dipenuhi dengan melaksanakan beberapa aktivitas yakni :

1. Sosialisasi pelaksanaan proyek baik tingkat desa maupun kabupaten (alat verifikasi [Laporan Kegiatan](#))
2. Survey pengumpulan data kondisi sosial ekonomi dan kondisi sumberdaya terumbu karang pada zona ombo/ DPL Wabula, status, pola pemanfaatan, tantangan dan peluang pengelolaan sumberdaya laut, karakteristik perikanan dan rantai pasok perikanan tuna (alat verifikasi [Laporan Kegiatan](#), [Laporan Survey Lapang](#) dan [Laporan PRa](#))

Indikator output 1 yang kedua adalah “Terfasilitasinya nelayan skala kecil untuk meregistrasikan kapal (armada penangkapan ikan) di Desa Wabula, Wabula 1, Wasuemba dan Holimombo Jaya untuk memperoleh Pas Kecil”. Indikator ini dipenuhi dengan melaksanakan aktivitas yakni :

1. Workshop Pendataan kapal perikanan skala kecil baik ditingkat kabupaten maupun di tingkat desa (alat verifikasi [Laporan Kegiatan](#))

2. Pelaksanaan pengukuran kapal perikanan skala kecil di lokasi program (alat verifikasi [Laporan Kegiatan dan foto dokumen Pas Kecil](#))

Output 2 telah dicapai oleh program ini, yakni “Meningkatnya kapasitas masyarakat melalui lembaga adat lokal dalam pengelolaan sumberdaya laut di lokasi proyek”.

Indikator output 2 yang pertama adalah “Terlaksananya pertemuan stakeholder dengan tujuan mendapatkan gambaran kebijakan dan program perlindungan masyarakat hukum adat, peran dan fungsinya, tantangan dan peluang penguatan lembaga adat dalam pengelolaan sumberdaya laut”. Indikator output ini dipenuhi dengan melaksanakan aktivitas yakni :

1. Pertemuan para pihak yang terlibat dalam pengelolaan KBA tingkat desa (alat verifikasi [Laporan Kegiatan](#))
2. Pertemuan para pihak yang terlibat dalam pengelolaan KBA tingkat kabupaten (alat verifikasi [Laporan Kegiatan](#))

Indikator output 2 yang kedua adalah “Meningkatnya pemahaman masyarakat melalui lembaga adat lokal dalam mengidentifikasi isu dan permasalahan dalam mengoptimalkan tata kelola sumberdaya laut dilokasi program”. Indikator output ini dipenuhi dengan melaksanakan aktivitas yakni :

1. Penguatan organisasi lembaga adat Wabula dalam pengelolaan sumberdaya laut berbasis adat (alat verifikasi [Laporan Kegiatan](#))
2. Pelatihan kapasitas peran dan fungsi lembaga adat dalam pengelolaan sumberdaya laut (alat verifikasi [Laporan Kegiatan](#))

Indikator output 2 yang ketiga adalah “Adanya pembatas dan rambu pada zona inti/daerah perlindungan laut (KaOmbo) di wilayah kelola masyarakat hukum adat Wabula”. Indikator output ini dipenuhi dengan melaksanakan aktivitas yakni :

Pengadaan dan pemasangan pembatas/rambu di zona inti daerah perlindungan laut Wabula (alat verifikasi [Laporan Kegiatan](#))

Output 3 telah dicapai oleh program ini, yakni “Tersedianya kebijakan rencana aksi pengelolaan sumberdaya laut berdasarkan keraifan lokal dalam mendorong tata kelola sumberdaya laut yang baik di lokasi proyek”.

Indikator output 3 yang pertama adalah “Meningkatnya pemahaman masyarakat dan lembaga adat untuk melahirkan adanya kebijakan atau rencana aksi bersama dalam pengelolaan sumberdaya laut berbasis masyarakat adat di KBA Wabula”. Indikator output ini dipenuhi dengan melaksanakan aktivitas yakni :

1. Penyusunan draft kajian kebijakan rencana aksi pengelolaan sumberdaya laut tingkat desa (alat verifikasi [Laporan Kegiatan dan Dokumen Rencana Aksi Pengelolaan Sumberdaya Laut](#))

2. Konsultasi publik rencana kebijakan rencana aksi pengelolaan sumberdaya laut (alat verifikasi Laporan Kegiatan dan Dokumen Rencana Aksi Pengelolaan Sumberdaya Laut)

Indikator output 3 yang kedua adalah “Terdokumentasinya dokumen rencana aksi pengelolaan sumberdaya laut dilokasi program berdasarkan kesepakatan bersama oleh pemerintah desa”. Indikator output ini dipenuhi dengan melaksanakan aktivitas yakni :

Pertemuan Koordinasi dan Konsultasi Publik Rencana Pengelolaan Kaombo, Integrasi Rencana Aksi dalam RPJMDes, dan Workhop Akhir (alat verifikasi Dokumen Rencana Aksi Pengelolaan Sumberdaya Laut, Lembar Komitmen dan Laporan Kegiatan)

IV. PERUBAHAN

1. Pengurangan ancaman terhadap spesies prioritas

Nama Spesies Prioritas	Ancaman	Status	Dokumen verifikasi
Penyu Sisik	Terperangkap Sero	jumlah ancaman menurun dari 6 ekor sebelum program menjadi 0 pada saat akhir program	(Survey/monitoring baseline dan endline)
Penyu Hijau	Terperangkap Sero	jumlah ancaman menurun dari 12 ekor sebelum program menjadi 2 ekor pada saat akhir program	
Teripang	perburuan, perdagangan	jumlah ancaman menurun 25 % pada saat akhir program	
Lola	(perburuan, perdagangan)	jumlah ancaman menurun 25 % pada saat akhir program	

2. Peningkatan pengelolaan terhadap KBA

Nama KBA	Bentuk Peningkatan Pengelolaan KBA	Luas (bagian) KBA yang Mendapatkan Peningkatan Pengelolaan	Dokumen Verifikasi
Koridor Laut Sulawesi tenggara (KBA Wabula)	Perlindungan ekosistem pesisir melalui skema perikanan berkelanjutan berdasarkan kearifan lokal	Mangrove 49,4 Ha Lamun 709,8 Ha Terumbu Karang 554,2 Ha	Dokumen Laporan Survey Laut dan Peta KaOmbo Wabula, Dokumen Rencana Aksi pengelolaan Sumberdaya Laut

3. Perlindungan kawasan (formal protected area)

Nama Kawasan	Bentuk Perlindungan Kawasan	Luas Kawasan/Tahun Penetapan	Dokumen Verifikasi
KaOmbo Awaktuu	DPL-RZWP3K	64 Ha/2006	Dokumen Laporan Survey Laut dan Peta KaOmbo Wabula, Dokumen Rencana Aksi pengelolaan Sumberdaya Laut
KaOmbo Saumuruu	DPL-RZWP3K	112 Ha/2007	

4. Penerima manfaat

a. Karakteristik penerima manfaat

Nama Komunitas	Jenis Komunitas							Ukuran Komunitas Penerima Manfaat			
	Ekonomi Subsisten	Small landowners (pemilik lahan)	Masyarakat hukum adat	Pastoralists / nomadic peoples	Recent migrants (pendatang baru)	Masyarakat lokal	Lainnya	50 sampai 250 jiwa	251 sampai 500 jiwa	501 sampai 1000 jiwa	Diatas 1000 jiwa
Desa Wabula	V		V							V	
Desa Wabula 1	V		V							V	
Desa Wasuemba	V		V						V		
Desa Wasampela	V					V			V		
Desa Holimombo Jaya	V					V				V	

b. Jumlah penerima manfaat

Manfaat Keuangan (*Cash Benefit*)

Jenis Manfaat	Langsung		Tidak-Langsung	
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan
Meningkatnya akses terhadap dunia usaha	85	15	2721	2878
Meningkatnya akses terhadap lembaga keuangan	15	10	2791	2883
Meningkatnya akses terhadap konsumen	310	88	2496	2805
Meningkatnya pendapatan kurang dari Rp 500.000 per bulan	111	38	841	868
Meningkatnya pendapatan antara Rp 500.000 hingga Rp 1.000.000 per bulan	185	46	1122	1157
Meningkatnya pendapatan: lebih dari Rp 1.000.000 hingga Rp 3.000.000 per bulan	6	2	421	433
Meningkatnya pendapatan: lebih dari Rp 3.000.000 hingga Rp 5.000.000 per bulan	8	2	281	289
Meningkatnya pendapatan: lebih dari Rp 5.000.000 per bulan	-	-	140	144

Manfaat Peningkatan Kapasitas

Jenis Manfaat	Langsung		Tidak-Langsung	
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan
Akses terhadap data/informasi dan kesempatan untuk memahami makna data/informasi	310	88	2806	2893
Keterwakilan dan kesempatan untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan di komunitas/kelompok	310	88	2806	2893
Keterwakilan dan kesempatan untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan di pemerintahan	310	88	2806	2893

Akses terhadap layanan publik (misalnya kesehatan, pendidikan, listrik)	310	88	2806	2893
Pengakuan atas kearifan lokal dan tata kelola lokal	310	88	2806	2893
Pelatihan/diskusi/lokakarya	310	88	2806	2893

Manfaat Layanan Alam Pesisir/Laut

Jenis Manfaat	Langsung		Tidak-Langsung	
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan
Meningkatnya ketersediaan pangan (misalnya melalui pemanfaatan ikan, kerang, kepiting dalam ekosistem mangrove, ataupun meningkatnya stok ikan karena adanya bank ikan)	310	88	2806	2893
Meningkatnya ketangguhan terhadap perubahan iklim melalui aksi mitigasi dan adaptasi (contoh mitigasi: mangrove sebagai penyerap karbon, contoh adaptasi: mangrove diolah sebagai sirup yang bisa dijual)	310	88	2806	2893
Meningkatnya ketangguhan terhadap resiko bencana (misalnya: mangrove sebagai penahan gelombang/tsunami, lamun sebagai pencegah abrasi)	310	88	2806	2893
Meningkatnya akses terhadap keindahan alam (rekreasional, batin)	310	88	2806	2893
Meningkatnya peluang adanya komoditas baru yang berkelanjutan (misalnya garam, wisata alam)	310	88	2806	2893

5. Regulasi/kebijakan lokal

Nama Regulasi/Kebijakan	Ruang Lingkup (nasional, lokal, desa)	Topik	Hasil yang Diharapkan
Perda Provinsi Sulawesi Tenggara No.9/2018	Regional Sulawesi Tenggara	Rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Sulawesi Tenggara	Adanya kewenangan MHA dalam Pengelolaan wilayah Laut dan Pesisir khususnya di Kecamatan Wabula
Perbub Buton No.13/2018	Desa	Pengakuan dan Perlindungan MHA Wabula	Meningkatkan eksistensi MHA Wabula dalam mengelola wilayah Nambo (laut) dan Pangkolo (daratan)
Perdes Wabula No.3/2006	Desa	Aturan Pelaksanaan Pengelolaan Terumbu Karang Terpadu Desa Wabula	Melindungi wilayah KaOmbo Awaktuu
Perdes Wasuemba No.700/23/2007	Desa	Daerah Perlindungan Laut dan Pesisir	Melindungi wilayah KaOmbo Saumuruu
Kesepakatan Adat	Desa	Rencana Aksi Pengelolaan Sumberdaya Laut – KaOmbo	Pedoman bagi lembaga Adat dan Pemerintah desa dalam mewujudkan tata kelola yang mendukung perikanan berkelanjutan

6. Jaringan kerja/forum multipihak

Nama Jaringan/Kemitraan	Ruang Lingkup (nasional, lokal)	Tujuan Penetapan	Tahun Penetapan
-	-	-	-

7. Bentang alam/laut produktif

Nama Bentang Alam Produktif	Bentuk Peningkatan Pengelolaan Bentang Alam Produktif	Luas (bagian) Bentang Alam Produktif yang Mendapatkan Peningkatan Pengelolaan	Dokumen Verifikasi
Wilayah Kelola MHA Wabula	Nambo Wabula	958 Ha	Perbub Kab. Buton No. 13 Tahun 2018 Dokumen Survey Laut
	KaOmbo Awaktuu (Buka Tutup)	64 Ha	
	KaOmbo Saumuruu (Penutupan secara Permanen)	110 Ha	

V. PEMBELAJARAN

- Kegiatan atau strategi yang berhasil dengan baik
 1. Tersedianya dokumen profil sumberdaya perikanan skala kecil di lokasi proyek dapat tercapai oleh karena MHA dan lembaga adat wabula menerima dan memberikan dukungan dalam pelaksanaan program, terfasilitasinya 85 surat ukur dan pas kecil bagi nelayan skala kecil karena besarnya inisiatif masyarakat secara sadar mendaftarkan kapalnya untuk proses registrasi memperoleh pas kecil sebagai wujud tindaklanjut untuk memperoleh akses kemudahan memperoleh subsidi BBM nelayan
 2. Terbitnya 85 surat ukur kapal dan pas kecil kapal nelayan tuna (< 5GT) dan diterima oleh masing-masing pemilik kapal
 3. Tersedianya profil sosial ekonomi, sumberdaya laut dan perikanan skala kecil di lokasi program
 4. Meningkatnya kapasitas masyarakat adat wabula dalam pengelolaan sumberdaya laut. Kondisi ini secara faktual dapat ditunjukkan dengan beberapa perilaku seperti adanya pergeseran penggunaan alat tangkap sero menjadi lebih jauh dan lebih tertata dari yang sebelumnya berdekatan dengan zona daerah perlindungan laut (KaOmbo) dan tidak tertata. Meningkatnya peran serta generasi penerus seperti siswa SD, SMP dan SMA dalam berbagai gerakan seperti aksi bersih pantai dan meningkatnya intensitas pengawasan oleh penjaga laut dalam wilayah KaOmbo dan penanganan terhadap biota penyu yang terperangkap pada sero untuk dilepas liarkan.
 5. Terpasang dan terfasilitasinya rambu penanda zona perlindungan laut secara permanen di 2 lokasi baik KaOmbo Awaktu maupun KaOmbo Saumuruu
 6. Adanya dokumen rencana aksi pengelolaan sumberdaya laut yang penyusunannya telah di inisiasi bersama antara pemerintah desa, lembaga adat dan pemerintah daerah sebagai pedoman bagi masyarakat dan lembaga adat dalam mengoptimalkan pengelolaan sumberdaya laut di wilayah KBA Wabula
 7. Adanya dukungan dan komitmen bersama untuk mengintegrasikan rencana aksi pengelolaan sumberdaya laut (KaOmbo) ke dalam rencana pembangunan di desa.

Hasil kegiatan (output) berjalan baik berkat dukungan dan peran aktif seluruh stakeholder yang terlibat selama pelaksanaan program, membangun komunikasi yang intensif dengan lembaga adat dan pemerintah desa. Pada beberapa kesempatan juga dilakukan monitoring terhadap pelaksanaan proyek yaitu selain dari internal DFW Indonesia sendiri juga dilakukan oleh lembaga adat dan pemerintah desa di lokasi proyek

- Kegiatan atau strategi apa yang kurang berhasil adalah proses fasilitasi Tanda Daftar Kapal Perikanan (TDKP). Pengurusan TDKP bagi pemilik kapal nelayan skala kecil pasca dilaksanakannya pengukuran kapal dan telah diterbitkannya Pas Kecil sejumlah 85 bagi nelayan penerima manfaat dilakukan secara mandiri melalui setiap desa untuk didaftarkan ke Dinas Perikanan Kabupaten Buton. Hal ini disebabkan karena adanya syarat tambahan seperti NPWP, NIB sebagai dampak dari UU Cipta Kerja. Sementara, nelayan dampingan bersatus nelayan mikro (< 5GT). Atas kondisi tersebut maka pendampingan terbatas pada penerbitan pas kecil .

Untuk memastikan keberlanjutan setelah program berakhir tentunya melakukan kegiatan monitoring, evaluasi dan pendampingan terhadap rencana aksi pengelolaan sumberdaya laut yang telah dirumuskan dan menjadi komitmen bersama pemerintah desa dan pemerintah daerah. Komitmen dimaksud adalah memastikan dokumen rencana aksi tersebut telah diintegrasikan ke dalam rencana pembangunan di desa. Selanjutnya lembaga adat dalam hal ini MHA Wabula sebagai pihak yang memiliki kewenangan pengelolaan di wilayah pesisir berdasarkan UU No.1 tahun 2014 atas perubahan UU No.27 tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dapat secara aktif dan bermitra dengan berbagai pihak yang terlibat dalam pengelolaan perikanan skala kecil di wilayah KBA Wabula melalui kegiatan-kegiatan pendampingan dalam rangka penguatan kapasitas lembaga adat wabula.

Bila program ini hendak direplikasi, maka beberapa yang sebaiknya dapat dilakukan adalah melakukan upaya perbaikan dan edukasi terhadap ekosistem pesisir misalnya perbaikan ekosistem terumbu karang dan mangrove, peningkatan kapasitas masyarakat/lembaga adat melalui kegiatan-kegiatan yang bersentuhan dengan ekonomi produktif, memberikan pendampingan dan penguatan terhadap kelompok masyarakat penjaga laut (Pengawas KaOmbo)

VI. STATUS KEUANGAN

- a. Pemasukan : 625.593.776
- b. Pengeluaran : 645.101.613
- c. Saldo : -19.507.837